



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEMIS
DAN GELANDANGAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

TEGAR PUTRA MAHENDARTO

NPM. 211003742018933

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
PATI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
TEGAR PUTRA MAHENDARTO
NPM. 211003742018933

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum.
NIDN. 0627076301

Anggota,

SRI WULANDARI, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0630126501

Anggota,

SARYANA, S.H., M.Si
NIDN. 0603046502

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	12
1. Pengertian Penegakan Hukum	12
2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum	14
3. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	17
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana Pengemis dan Gelandangan	22
D. Upaya Penanganan Pengemis dan Gelandangan	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Penyajian Data	43
F. Metode Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengemis Dan Gelandangan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati	45
B. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan Di Wilayah hukum Kabupaten Pati	64
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan di wilayah hukum Kabupaten Pati merupakan tantangan yang kompleks dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan di Kabupaten Pati serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan Di Wilayah hukum Kabupaten Pati dan upaya mengatasinya. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research), yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati dilakukan melalui usaha preventif, represif, dan rehabilitatif. Usaha preventif melibatkan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan usaha represif menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran. Usaha rehabilitatif bertujuan memberikan solusi jangka panjang dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan sosial kepada pengemis dan gelandangan agar dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan Di Wilayah hukum Kabupaten Pati yaitu kurangnya infrastruktur sosial, koordinasi yang belum optimal antar lembaga, serta tantangan hukum dan administratif yang rumit. Budaya masyarakat yang masih menganggap pengemis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari juga menjadi tantangan tersendiri. Hambatan ini menghambat efektivitas penanganan hukum yang berkelanjutan, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan solusi yang lebih holistik. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemis dan gelandangan di Kabupaten Pati, perlu meningkatkan infrastruktur sosial koordinasi antar lembaga, serta Sosialisasi kepada masyarakat

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Pengemis dan Gelandangan